



POLA ADAPTASI MASYARAKAT PESISIR GENUK KOTA SEMARANG

Patterns of Community Adaptation to Environmental Degradation in
Genuk Coastal Area, Semarang City

Sariffuddin¹, Arwan Putra Wijaya²

Diterima : 3 Oktober 2014

Disetujui: 13 November 2014

Abstrak: Globalisasi telah membawa banyak konsekuensi terhadap perkembangan kota-kota dan masyarakatnya, salah satu wujudnya berupa industrialisasi. Globalisasi juga berdampak pada transformasi kebijakan yang berdampak pada kesejahteraan dan gaya hidup masyarakat. Salah satu indikatornya adalah nilai-nilai lokal mulai luntur. Kondisi serupa juga terjadi pada permukiman pesisir di Kota Semarang yang telah tertransformasi menjadi permukiman perindustrian di tahun 1980-an. Perubahan pemanfaatan lahan terjadi dari tambak dan sawah menjadi gedung-gedung pabrik, gudang dan perumahan para buruh. Itu terjadi bukan dalam jangka waktu yang panjang dari nilai-nilai masyarakat lokal yang kemudian tertransformasi ke dalam nilai-nilai baru yang dipengaruhi oleh kesejahteraan. Berlandaskan pada fenomena, penelitian ini bertujuan untuk memahami pola adaptasi dan gaya hidup masyarakat dan pengaruhnya di dalam mengatur lingkungan permukiman dengan area pesisir Genuk Kota Semarang sebagai obyek penelitiannya. Penelitian ini memiliki tiga sasaran yaitu: (1) untuk memahami motivasi masyarakat berurbanisasi, (2) Untuk menjelaskan kondisi lingkungan permukiman, dan (3) Untuk menjelaskan pengaruh kesejahteraan terhadap pola adaptasi masyarakat. Untuk mencapai tujuan penelitian, pendekatan kualitatif digunakan yang dilengkapi oleh beberapa data kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan adanya 3 kelas masyarakat mempengaruhi pola adaptasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa alasan bermigrasi memiliki pengaruh besar terhadap pengelolaan lingkungan. Diketahui bahwa masyarakat kelas menengah berperan besar terhadap permasalahan lingkungan. Berkebalikan, masyarakat kelas bawah berpengaruh rendah terhadap kualitas lingkungan permukiman. Masyarakat kelas menengah ke atas memberikan perhatian besar terhadap kualitas lingkungan. Masyarakat kelas menengah menganggap bahwa permasalahan lingkungan merupakan kesalahan proses perencanaan dan pembangunan.

Kata kunci: permukiman pesisir, pola adaptasi

Abstract: Globalization brings many consequences for Indonesian urban development and the communities. Industrialization is one of them. Globalization also brings policy transformation affecting the community's welfare and lifestyle. One of the indicators is that local values have started to fade. The similar condition also occurs in fishermen's and fish farmers' settlements in Semarang, which have transformed into industrial settlements in 1980s during the industrialization period. Land conversion occurred in a short time from ponds and rice fields into factories, warehouses, and new labor's settlements. It did not take a long time for the community's local values to transform into the new ones influenced by the welfare level of the new community. Based on the phenomena, this study aims to understand the lifestyle of the community and its influence in managing the housing environment with Genuk coastal area of Semarang City as a

¹ Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro,
Jl. Prof. Soedarto, SH Kampus Undip Tembalang, Semarang

² Program Studi Geodesi, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedarto, SH Kampus Undip Tembalang, Semarang

Korespondensi : sariffuddin@undip.ac.id

case. This research has three objectives: to understand the motivation to urbanization, to comprehend the neighborhoods' conditions, and to comprehend the influence of community's lifestyle towards the settlement condition. In achieving the objectives, the qualitative approach supported by some quantitative data is used. The results show that there are three classes of the community influencing the environmental management. It is found that the people's migration reasons had a big influence for the environmental management. In this case, the middle-class community is a key stakeholder to overcome the environmental problems. It becomes good initiator. On the contrary, the lower class has a less role in dealing with the environmental problems. It has even a big contribution on environmental degradation. Meanwhile, the upper class pays less attention to the environment. Only a little part of it, especially the local one, is willing to take part in the environmental management. The middle-class people consider that the problems arise due to the inappropriate planning. Unfortunately, they are not capable of dealing with the problems. On the contrary, the upper-class people consider that the issues arise from the lower class behavior that does not pay attention to the environment. As a consequence, the upper-class community is not willing to address the problems.

Keywords: coastal settlement, adaptation pattern

Pendahuluan

Kota-kota di dunia menghadapi tantangan baru berupa tingginya arus urbanisasi (Becker dan Morrison, 1999, Eric, dkk., 2010), perubahan iklim (Hoorweg, dkk., 2010) dan pesatnya perkembangan teknologi informasi (Graham, 1998) yang sering di sebut sebagai trinitas dunia (*trinity world*) (Abdoulleev, 2011). Khusus kota-kota di negara berkembang, tingginya laju urbanisasi telah mengubah kota-kota kecil menjadi kota-kota besar (Fahmi, dkk., 2014) dan mulai tidak terkendali perkembangannya (Murakami, dkk., 2005). Dampak yang diakibatkan adalah permasalahan lingkungan perkotaan (Yusuf dan Resosudarmo, 2009), konversi lahan (Firman, 2000), kemiskinan, permukiman kumuh (Minnery, dkk., 2013) dan pada akhirnya mengancam keberlanjutan suatu kota (Yuan, 1999). Di Indonesia, industrialisasi dan berbagai 'mega proyek' global lainnya berpengaruh terhadap pertumbuhan kota yang menstimulasi migrasi penduduk desa menuju kota untuk meningkatkan kesejahteraan. Masyarakat desa yang bekerja di sektor vital berupa pertanian dan peternakan mulai kewalahan dengan tuntutan kebutuhan yang semakin banyak. Mereka memilih meninggalkan pekerjaan dan berurbanisasi ke kota agar bisa mendapatkan penghasilan lebih tinggi. Secara langsung, perpindahan penduduk dari desa ke kota dibarengi perubahan mata pencaharian terutama dari sektor vital ke sektor non vital atau bahkan sama sekali tidak vital. Sektor vital yang selama ini menjadi tumpuan utama hidup masyarakat tidak mampu lagi memberikan 'kesejahteraan'. Mereka lebih memilih bekerja di sektor jasa yang non vital namun memiliki penghasilan lebih besar. Di sisi lain, perpindahan masyarakat tersebut juga mengantarkannya pada fenomena masyarakat 'gelembung sabun' (Soemardjan, 1998) dan mengubah struktur tenaga kerja masyarakat (Becker dan Morrison, 1999). Industrialisasi dan modernisasi di Indonesia ternyata juga telah mengubah nilai-nilai kehidupan masyarakat (Heryanto, 2004). Kesenjangan desa-kota juga menjadi faktor penggerak pesatnya arus urbanisasi (Wilsonyudho, 2009).

Peningkatan kesejahteraan merupakan tujuan perpindahan masyarakat dari desa ke kota (Rogerson, 1999). Secara progresif, pergeseran penduduk diikuti perubahan terhadap cara hidup yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Kekuatan penarik kota berada pada lapangan pekerjaan yang membutuhkan tenaga kerja yang sebagian besar berupa industri (Ahlfeldt, 2011, Bromley, dkk., 2007, Eid, dkk., 2008, Özkaynak, 2008). Besarnya laju urbanisasi akan berpengaruh secara langsung pada perkembangan kota. bukan hanya dipengaruhi oleh besarnya migrasi tetapi juga kebudayaan dan nilai-nilai yang dibawanya (Cadieux, 2008). Urbanisasi dan terbentuknya embryo kota-kota baru yang berkembang dari perdesaan menjadi faktor penentu perkembangan kota (Blanco, dkk., 2009). Gaya hidup para migran menjadi salah satu penentu arah perkembangan kota dan tentunya berpengaruh terhadap kualitas hidup mereka.

Menjadi penting memahami kualitas hidup masyarakat dalam fenomena pertumbuhan kota. Dinamika pertumbuhan perkotaan secara langsung akan berpengaruh pada tingkat kualitas hidup begitupula sebaliknya (Myers, 1988). Meskipun perhatian terhadap kualitas hidup tidak bisa jauh dari kebijakan dan politik suatu kota bahkan negara. Pemangku kebijakan merupakan aktor kunci untuk mensejahterakan rakyatnya dengan memberlakukan kebijakan-kebijakannya (Myers, 1988). Persoalan yang menjadikan perhatian terhadap kualitas hidup semakin meningkat. Bahkan definisi mengenai

kualitas hidup sendiri sangat beragam dan sangat tergantung disiplin ilmu yang mencetuskannya. Kota (*urban*) merupakan sebuah label yang bersifat deskriptif untuk menggambarkan dua hal yang berhubungan dengan tempat dan satu set pola khas yang ada didalamnya yang terdiri dari nilai-nilai dan perilaku masyarakat. Pertumbuhan kota dan urbanisasi telah menciptakan kota-kota sebagai 'rumah' bagi lebih dari setengah populasi dunia (Clark, 1996).

Menarik ditelisik lebih mendalam mengenai bagaimana pola adaptasi masyarakat pesisir Genuk yang sebagian besar merupakan masyarakat urban yang datang dari desa-desa sekitar Kota Semarang? Pertanyaan penelitian ini didasari oleh pernyataan Adger dan Vincent (2005) yang menyatakan bahwa kemampuan adaptasi masyarakat ditentukan oleh kemampuan ekonomi, pengetahuan, pengalaman dan respon masyarakat terhadap kondisi lingkungan. Peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat tidak terlepas dari upaya mereka mendapatkan penghasilan lebih besar melalui urbanisasi ke perkotaan. Begitu pula dengan pengetahuan, pengalaman dan respon masyarakat sangat ditentukan oleh interaksi sosial warga maupun etika lingkungan mereka. Pemahaman melalui prinsip kualitas hidup masyarakat melatarbelakangi penilaian kemampuan adaptasi masyarakat ini. Penelitian sebelumnya mengenai bentuk adaptasi masyarakat pesisir Kota Semarang telah diteliti oleh Dewi (2007), Suryanti dan Marfai (2008) dan Marfai dan Hizbaron (2011) yang lebih banyak membahas bentuk adaptasi dan persepsi masyarakat pesisir serta alasan mereka tetap tinggal di lingkungan terpencil. Penelitian ini merupakan lanjutan dari ketiga penelitian sebelumnya yang lebih mengupas pola adaptasi yang dikaitkan dengan perilaku masyarakat urban yang datang dari pedesaan.

Untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut, pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan memanfaatkan hasil wawancara, studi pustaka dan penelitian terdahulu serta observasi lapangan. Metode ini cukup efektif digunakan karena penelitian ini merupakan sebuah studi yang berlanjut dari tahun 2005. Informan wawancara ditentukan menggunakan teknik Snowballing berdasarkan informasi yang didapatkan dari setiap stakeholder kunci. Penentuan informan dilakukan secara iterasi selama penelitian dari lembaga pemerintah hingga ke tokoh masyarakat yang memiliki informasi lengkap mengenai kehidupan masyarakat dan sejarah perkembangan permukiman di Pesisir Genuk Kota Semarang. Studi ini dibagi menjadi tiga sasaran yaitu (1) memahami pengaruh motif bertempat tinggal, (2) kondisi lingkungan permukiman dan (3) melihat pengaruh perilaku masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan permukiman dan (4) pola adaptasi masyarakat. Pemahaman mengenai motif bertempat tinggal (*who of life*) merupakan langkah penting untuk memahami motif masyarakat berurbanisasi dan bertempat tinggal. Mengingat sebagian besar masyarakat adalah pendatang dan kaum urban dari pedesaan. Kemudian pada tahap ke dua, peneliti memahami kondisi lingkungan dilakukan berdasarkan data observasi langsung. Mengingat, banyak penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka studi pustaka mengenai penelitian terdahulu menjadi salah satu sumber utama penemuan data dan informasi mengenai wilayah studi.

Hasil dan Pembahasan

Motif Bertempat Tinggal warga (who of life)

Pada umumnya seseorang bertempat tinggal karena dua prinsip yaitu *pertama* untuk mendapatkan keamanan dan kenyamanan (*safety*) dan *kedua* untuk mengembangkan kehidupannya (*growth*). Motif yang pertama biasanya berlaku jika motif kedua (*growth*) sudah terpenuhi. Jadi motif bertempat tinggal juga mengindikasikan kualitas hidup penghuninya. Namun motif bertempat tinggal juga terkait dengan kondisi sosial budaya serta nilai-nilai yang berlaku di masyarakat (Ceccato dan Lukyte, 2011). Permukiman di pesisir Genuk, Semarang berkembang setelah penetapan dan pembangunan industri. Orang mulai berdatangan untuk bekerja sebagai karyawan industri maupun bekerja di sektor non industri. Pertama kali kawasan industri yang ada di zona tersebut adalah Lingkungan Industri Kecil (LIK), namun pengaruhnya dalam menarik para pendatang tidak begitu besar. Para pekerja yang bekerja di lingkungan industri kecil ini berasal dari sekitar Kecamatan Genuk terutama Kelurahan Muktiharjo Lor, Genuksari dan Gebangsari. Namun setelah terbangunnya industri di Kelurahan Terboyo Wetan dan Trimulyo, arus pendatang semakin besar. Awalnya, pendatang berasal dari Kabupaten Demak dan Grobogan, tetapi dalam perkembangannya banyak pula yang berasal dari kabupaten/ kota lain bahkan Propinsi Jawa Timur dan Jawa Barat. Tujuan mereka datang adalah untuk bekerja di sektor industri.

Motif pendatang bermukim adalah untuk mendekati tempat kerja. Sebagian besar warga adalah pendatang yang bekerja di sektor industri maupun sektor lain di Kecamatan Genuk. Hampir setiap kawasan industri di Kecamatan Genuk tidak memiliki *buffer* kawasan sehingga langsung berbatasan

dengan permukiman penduduk. Bahkan dapat di gambarkan bahwa daerah dekat industri merupakan daerah perumahan padat, dan semakin menurun pada daerah yang jauh dari industri. Rumah-rumah membentuk kantong-kantong permukiman yang mendekati industri. Setiap kawasan industri memiliki "kantong" permukiman sendiri-sendiri meskipun warganya tidak seluruhnya bekerja sebagai karyawan industri.

Kenyataannya, penduduk yang mempunyai rumah dekat industri tidak sepenuhnya bekerja sebagai buruh industri. Mereka menyewakan kamar ataupun mengontrakkan rumahnya untuk para karyawan. Pada awalnya warga ini bekerja di zona industri, namun dalam perkembangannya mereka beralih usaha dengan menyewakan kamar sebagai kost untuk para karyawan yang setiap bulan semakin bertambah. Selain warga setempat juga ada warga dari luar Kecamatan Genuk yang membeli kapling rumah dan membangunnya sebagai kos-kosan karyawan. Kebanyakan rumah-rumah besar di pinggiran kawasan industri berfungsi serupa. Motif penduduk bermukim adalah untuk meningkatkan perekonomian. Sehingga prinsip *growth* lebih dominan dibandingkan prinsip *safety*. Prinsip tersebut sangat jelas teridentifikasi dari motif para pendatang yang mendekati tempat kerja dengan menyewa kos-kosan, begitupula warga setempat yang memanfaatkan potensi zona industri sebagai penyedia kos-kosan dan berdagang. Prinsip *safety* bukan menjadi prioritas bermukim warga ataupun pendatang. Hal ini terlihat dari kondisi lingkungan di dekat kawasan industri yang terpuruk namun minat pendatang untuk menyewa kamar maupun kontrak rumah yang besar.

Kondisi Lingkungan Permukiman

Timbulnya rumah-rumah tidak layak huni (kumuh) merupakan dampak dari urbanisasi dan kurangnya ketrampilan para pendatang. Warga yang menghuni rumah tidak layak huni (kumuh) sebagian besar bukanlah warga Kota Semarang, mereka datang untuk dapat bekerja di sektor industri tetapi karena keterbatasan pendidikan dan ketrampilan sehingga banyak yang tidak tertampung oleh industri. Rumah-rumah yang didirikan, tidak memenuhi syarat kesehatan. Banyak rumah dengan luas tidak lebih dari 21 m², tidak dilengkapi jendela, dinding dari papan tidak utuh, lantai dari tanah dan pada saat hujan terkena banjir dan rob. Kondisi ini terjadi di lingkungan permukiman yang berada di kawasan industri dan bantaran sungai. Timbulnya rumah kumuh ini sudah lama akan tetapi mulai banyak sejak tahun 1997 yaitu setelah reformasi, banyak warga mematok/mengkapling bidang-bidang tanah untuk didirikan rumah tinggal (Sariffuddin, 2006).

Rumah tidak layak huni banyak terdapat di perumahan padat dan terletak dekat dengan kawasan industri atau pabrik meskipun mereka tidak bekerja sebagai buruh pabrik. Kondisi ini disebabkan oleh orientasi penduduk untuk mendekati tempat kerja. Para pemilik rumah tidak layak huni adalah para pekerja informal yang bekerja sebagai kuli, tukang becak, maupun jasa tambal ban di sekitar kawasan industri. Kelurahan Terboyo Wetan merupakan daerah yang strategis dan memiliki kedekatan dengan sektor perekonomian yaitu Terminal Terboyo, pelabuhan, kawasan industri, dan pasar. Potensi-potensi tersebut menjadi salah satu daya tarik penduduk untuk membangun rumah. Disamping itu, di sekitar kawasan industri masih banyak lahan-lahan kosong belum terbangun yang dimiliki pada pemilik pabrik.

Rumah-rumah di pesisir Genuk adalah rumah swadaya. Penduduk membangun sendiri rumah mereka tanpa ada campur tangan swasta (*developer*) ataupun pemerintah. Pembangunan rumah oleh warga dimulai sejak dibangunnya kawasan industri di Lingkungan Industri Kecil (LIK) dan Kawasan Industri Terboyo Megah. Duapuluh tahun yang lalu rumah-rumah mengelompok di sepanjang Sungai Ngilir Kelurahan Trimulyo yang sekarang telah diperlebar menjadi saluran drainase kota sekaligus batas Kelurahan Trimulyo dan Kelurahan Terboyo Wetan. Sepanjang sungai ini merupakan awal perkembangan permukiman di Kelurahan Terboyo Wetan dan Trimulyo. Pada waktu itu penduduk menyebutnya *kongsi*, yaitu tempat penambatan kapal nelayan tetapi bukan tempat pelelangan ikan. Seiring dengan perkembangan kawasan Industri Terboyo Megah dan LIK daerah ini menjadi salah satu pilihan utama para pendatang untuk menyewa rumah atau sewa kamar (kost). Daerah ini berkembang, ditandai dengan dibangunnya rumah-rumah penduduk baru yang masih mengikuti sungai sebagai orientasi pertumbuhan. Setelah lahan di pinggir sungai 'habis', akhirnya orientasi perkembangan permukiman mulai melebar menjauhi sungai. Pertambahan rumah cukup cepat, hingga salah satu makam di Kelurahan Terboyo Wetan ikut 'tergusur' (Sariffuddin, 2006).

Kualitas Lingkungan Permukiman

Pengaruh perkembangan permukiman terhadap kualitas lingkungan hidup sangat besar. Arus urbanisasi dan pengalau yang besar telah memberikan kontribusi negatif bagi lingkungan hidup. Banyaknya pengalau terutama di jam-jam puncak telah menimbulkan kemacetan di Jalan Kaligawe dan tentunya juga berakibat pada peningkatan pencemaran udara. Hal ini didukung oleh data kualitas udara dari Bapedalda Kota Semarang, dimana pencemar tertinggi adalah PM₁₀ yang berasal dari pembakaran tidak sempurna kendaraan bermotor terutama yang berbahan bakar solar. Sedangkan para pendatang yang berasal dari luar kota cenderung menetap di sekitar kawasan industri, yaitu daerah yang dekat dengan industri untuk mengurangi pengeluaran transportasi. Akibat yang ditimbulkan adalah konsentrasi permukiman cukup tinggi di daerah sekitar industri (daerah dekat industri) bahkan banyak pula warga yang tidak mampu membangun rumahnya di lahan-lahan bukan miliknya (*illegal*).

Ada kecenderungan bahwa kualitas permukiman di pesisir Genuk semakin terpuruk. Hal ini disebabkan pencemaran air oleh industri dan rumah tangga, pencemaran udara akibat kendaraan bermotor yang semakin banyak dan macet, semakin meluasnya daerah rawan rob dan banjir serta penurunan permukaan tanah (*land subsidence*). Di tahun 2012, genangan rob seluas 20,76%, diperkirakan meluas menjadi 22,32% dari keseluruhan wilayah Kota Semarang pada tahun 2015 (Nugraha, dkk., 2012). Luasnya genangan rob dipengaruhi oleh peningkatan muka air laut sebesar 5,43 cm/tahun akibat kenaikan muka air laut global sebesar 2,65 mm/tahun dan penurunan tanah sebesar 5,165 cm/tahun (Wirasatria, dkk., 2006). Akibat langsung yang dirasakan adalah sarana dan prasarana menjadi rusak serta semakin mahalnya biaya pembangunan dan perawatan infrastruktur kota. Bercampurnya limbah industri, limbah rumah tangga dan drainase telah mencemari air permukaan (sungai), dan sumur dangkal sehingga akses warga untuk memenuhi kebutuhan air bersih hanya terpusat pada pelayanan sumur artesis. Daerah rawan genangan tersebut adalah permukiman penduduk sehingga rumah penduduk juga rawan terjadi kerusakan, kualitas bangunan menurun dan keselamatan bangunan terancam. Pada akhirnya akan menurunkan kesejahteraan warganya.

Keterpurukan tersebut tidak hanya disebabkan oleh industri namun juga diakibatkan oleh perilaku manusia. Penyebab penurunan kualitas lingkungan dapat dikategorikan menjadi 2 yaitu *pertama* dampak dari aktivitas kawasan baik aktivitas industri maupun permukiman, dan *kedua* dampak dari perilaku manusia baik warga yang tinggal di permukiman maupun para pengelola industri. Aktivitas kawasan yaitu industri dan rumah tangga telah menyebabkan pencemaran lingkungan terutama air, udara dan tanah. Sedangkan perilaku manusia, berupa perilaku eksploitasi sumber daya lingkungan. Contohnya adalah pemenuhan kebutuhan air bersih yang hanya bersumber pada sumur artesis yang jelas-jelas telah menyebabkan penurunan tanah. Begitupula, pembangunan rumah-rumah yang berada di bantaran sungai dan sungai telah menyebabkan penyumbatan dan menghambat aliran air. Kondisi ini diperparah oleh perilaku warga yang membuang sampah di sungai dan selokan. Padahal dampak dari perilaku tersebut juga dirasakan oleh warga seperti pada saat rob dan banjir, air yang menggenangi adalah air kotor yang tertahan oleh sampah dan penyumbat lain. Banyak warga yang mengeluh akibat kondisi tersebut namun mereka juga tidak melakukan suatu strategi pengelolaan lingkungan.

Pengaruh Gaya Hidup Penduduk

Manusia merupakan bagian dari sistem lingkungan hidup sebagai suatu konsekuensi ekosistem. Ia mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan hidupnya secara sirkuler (Soemarwoto, 1983). Ia membentuk dan terbentuk oleh lingkungan hidupnya. Proses pembentukan ini terjadi karena adanya proses adaptasi manusia terhadap lingkungan (Folke, 2006). Ada dua prinsip adaptasi manusia yaitu *pertama* merubah lingkungan agar sesuai dengan keinginan manusia dan *kedua* manusia menyesuaikan diri dengan lingkungan tanpa melakukan perubahan. Kedua prinsip tersebut berlaku secara bersamaan, sedangkan yang membedakan adalah manusia lebih dominan merubah lingkungan ataukah menyesuaikan dengan lingkungan. Sehingga secara prinsip kondisi lingkungan merupakan "produk" dari proses adaptasi manusia yang menempatnya. Jika manusia memiliki kearifan dan berperilaku baik terhadap lingkungan tentunya akan terbentuk lingkungan yang baik pula. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perilaku masyarakat sebenarnya dapat diketahui melalui kondisi lingkungan permukiman dan kondisi rumah warga.

Perilaku (*lifestyle*) masyarakat terkait dengan prinsip bermukim warga yang lebih berorientasi untuk meningkatkan kemampuan berkembang (*growth*) daripada kenyamanan dan keamanan (*safety*). Sehingga aktivitas yang terasa di lingkungan permukiman adalah kesibukan warga untuk bekerja sedangkan kepedulian terhadap lingkungan masih rendah. Banyak ditemukan sungai ataupun drainase

yang tersumbat oleh sampah sehingga air kotor tidak dapat mengalir. Orientasi pekerjaan tersebut mendorong masyarakat untuk lebih peduli pada pekerjaannya, mereka tidak terlalu peduli dengan kondisi lingkungan hidup di sekitarnya. Banyak masyarakat yang menempati 1 rumah untuk lebih dari 2 KK. Para keluarga yang tinggal dalam satu rumah tersebut memiliki orientasi yang sama yaitu bekerja sedangkan rumah hanya berfungsi sebagai tempat singgah saja yaitu dapat tidur, makan, ketemu keluarga dan lain-lain. Bisa dikatakan bahwa rumah hanya sebagai tempat istirahat. Ketidakpedulian masyarakat terhadap kondisi rumahnya tersebut tercermin pada kepuasan masyarakat yang sangat tinggi dengan kondisi rumahnya meskipun kondisinya tidak memenuhi syarat kesehatan.

Hubungan antara lingkungan permukiman dengan penghuninya adalah sirkular (Soemarwoto, 1983). Dampak yang ditimbulkan dari perilaku warga tidak langsung dirasakan namun dalam kurun waktu yang lama (\pm 20 tahun) baru dapat dirasakan. Dampak yang timbul lebih banyak bersifat negatif dibandingkan yang positif. Sektor ekonomi berdampak positif, banyak warga menggantungkan perekonomiannya pada sektor industri dan sektor pendukung lain. Namun karena perilaku yang kurang mengindahkan lingkungan permukimannya menjadikan keterpurukan lingkungan hidup. Menurut wawancara dengan tokoh masyarakat dan warga diketahui bahwa sebagian besar penduduk pendatang adalah berasal dari desa. Di desa, warga desa memiliki kearifan tertentu yang timbul secara turun-temurun dan memiliki hubungan yang baik dengan lingkungannya (Clark, 1996). Namun kearifan hubungan tersebut tidak sepenuhnya dapat diterapkan di kota. Warga tidak tahu perilaku yang harus dilakukan agar kelestarian lingkungan dapat tercapai. Di desa, lingkungan yang terbentuk adalah lingkungan alami sedangkan di kota lebih cenderung buatan dan merupakan hasil rekayasa manusia dan tidak memiliki kemampuan regenerasi atau perbaikan diri seperti lingkungan alam.

Terdapat tiga kelas masyarakat di Pesisir Genuk yang berpengaruh terhadap pengelolaan lingkungan permukiman. *Pertama*, Masyarakat pekerja informal dan tinggal di tempat-tempat ilegal ataupun tanah marginal. Kebanyakan masyarakat bekerja sebagai kuli, tukang parkir dan berpendidikan sangat rendah atau bahkan tidak berpendidikan. Mereka menganggap bahwa lingkungan yang buruk merupakan konsekuensi logis dari permukiman pesisir. Disamping itu, masyarakat golongan ini tidak memiliki andil yang signifikan dalam pengelolaan lingkungan. *Kedua*, Masyarakat buruh industri. Mereka berpendidikan menengah hingga tinggi. Mereka memiliki andil sangat besar dalam pengelolaan lingkungan. Banyak forum-forum warga yang dimotori oleh kelompok ini. *Ketiga*, Masyarakat yang kaya, memiliki aset besar di lingkungannya. Kepedulian terhadap lingkungan cukup rendah. Mereka menanggapi bahwa kondisi lingkungan yang buruk karena ulah para warga kelas bawah yang tidak sadar lingkungan (Sariffuddin, 2010).

Ketidaktahuan warga dalam pengelolaan dan perbaikan lingkungan menjadikan kurang adanya etika dan kearifan terhadap lingkungan hidup. Dalam proses yang panjang dan dilakukan oleh banyak orang akhirnya perilaku warga tersebut menjadikan lingkungan permukiman terpuruk. Di desa, warga membuang membuang sampah di kebun ataupun membakarnya bukan menjadi masalah. Namun di kota dengan kepadatan rumah yang tinggi tentunya perilaku tersebut menimbulkan banyak masalah baik secara fisik maupun sosial. Karena ketidaktahuan warga terhadap lingkungan permukiman mengakibatkan kondisi lingkungan permukiman semakin terpuruk. Hal ini diperparah oleh pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas industri, para penglaju dan limbah rumah tangga. Kondisi tersebut menjadikan warga setempat tidak mampu lagi untuk mengelola lingkungannya. Masalah yang timbul semakin kompleks. Menurut wawancara dengan warga, pada awalnya masalah lingkungan terjadi di lingkungan industri seperti pencemaran air, dan udara. Namun dalam perkembangannya, pencemaran tersebut meluas hingga lingkungan permukiman.

Banyak perilaku bercirikan budaya masyarakat desa yang diterapkan di kota oleh para pendatang. Penduduk yang dekat dengan sungai lebih cenderung memanfaatkan sungai sebagai media pembuangan limbah cair dan padat. Sungai sebagai media saluran limbah dan dimanfaatkan pula untuk jamban/WC. Kondisi tersebut dapat dijumpai di Kelurahan Terboyo Kulon, Terboyo Wetan, dan Trimulyo. Kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah juga rendah. Banyak masyarakat yang membuang sampah di sungai atau tempat-tempat kosong. Masyarakat juga belum memisahkan antara drainase dengan limbah rumah tangga. Disamping itu partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan permukiman juga rendah. Partisipasi/gotong royong sering dilakukan masyarakat jika sarana dan prasarana lingkungan yang rusak seperti jalan rusak atau jembatan rusak tetapi partisipasi dalam mengelola kebersihan lingkungan, kebersihan sungai, drainase dan lain-lain masih rendah. Pengelolaan tersebut hanya dilakukan oleh beberapa keluarga dan berlokasi pada sekitar rumahnya. Permasalahan lingkungan semakin terpuruk dan menjadi masalah sosial. Masyarakat merasa terganggu oleh keberadaan lingkungan yang semakin lama semakin buruk dan kotor. Namun masyarakat tidak dapat menyelesaikan masalah. Warga menganggap bahwa pengelolaan lingkungan saat ini merupakan suatu tindakan yang

percuma, karena lingkungan yang sudah dikelola dan diperbaiki dapat dipastikan akan rusak kembali. Sehingga secara prinsip masalah lingkungan yang disebabkan oleh perilaku masyarakat terjadi karena *pertama* ketidaktahuan warga dalam mengelola lingkungan permukiman, *kedua* ketidakmampuan mengelola dan mengembalikan kondisi lingkungan menjadi lebih baik, *ketiga* ketidakmauan karena pengelolaan lingkungan merupakan suatu tindakan yang percuma.

Pola Adaptasi Masyarakat

Pendapat yang dikemukakan oleh Adger dan Vincent (2005) bahwa kemampuan adaptasi masyarakat bergantung dengan kemampuan ekonomi, pengetahuan, pengalaman dan respon masyarakat terhadap kondisi lingkungan tidak sepenuhnya berlaku di masyarakat Genuk. Kemampuan ekonomi lebih dominan mempengaruhi kemampuan adaptasi masyarakat dan sekaligus membentuk pola adaptasi masyarakat pesisir. Kemampuan ekonomi ini membentuk kelas masyarakat yang mengindikasikan pola adaptasi masyarakat. Ketiga kelas masyarakat tersebut adalah (1) masyarakat kelas bawah yang bekerja di sektor informal, (2) masyarakat kelas menengah yang bekerja sebagai buruh industri dan (3) masyarakat kelas atas yang bekerja sebagai pengusaha dan pegawai. Ketiga kelas masyarakat ini yang berpengaruh terhadap pola adaptasi masyarakat. Masyarakat kelas bawah bertahan karena tidak memiliki pilihan lain, sehingga 'terpaksa' menerima kondisi lingkungan permukiman di sekitarnya. Kenyamanan dan keamanan lingkungan permukiman bukan menjadi prioritas utama dalam kehidupan mereka. Orientasi bertempat tinggal adalah untuk bertahan hidup bagi keluarganya. Masyarakat kelas menengah menganggap kenyamanan dan keamanan lingkungan sebagai kebutuhan penting yang mereka sediakan sendiri melalui peninggian rumah ataupun peninggian lantai rumah. Berbeda dengan masyarakat kelas atas yang juga bertahan tinggal karena memang 'ladang rejeki' mereka di daerah zona industri sebagai penyedia kos-kosan dan usaha lain.

Bentuk adaptasi masyarakat sebelumnya telah diteliti oleh Marfai dan Hizbaron (2011) dan Suryanti dan Marfai (2008) yang menyimpulkan ada 4 bentuk adaptasi yaitu (1) meninggikan lantai rumah, (2) meninggikan rumah, (3) membuat selokan penampung air di depan rumah, dan (4) menutup saluran drainase di saat air pasang. Pola masyarakat beradaptasi terhadap kondisi lingkungannya sangat dipengaruhi oleh faktor ekonomi, adapun faktor pengetahuan dan pengalaman masyarakat justru tidak mendukung kapasitas masyarakat beradaptasi. Faktor ekonomi berpengaruh besar karena pola adaptasi yang dilakukan harus mengintervensi kondisi lingkungan. Kembali pada pernyataan Soemarwoto (1983) bahwa ada 2 cara makhluk hidup beradaptasi, yaitu (1) bertahan dengan kondisi lingkungannya, dan (2) mengubah lingkungan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan. Masyarakat kelas bawah lebih pada cara bertahan hidup yang pertama yaitu bertahan dengan kondisi lingkungan permukimannya, sedangkan masyarakat kelas menengah-atas lebih pada cara ke dua yaitu mengubah lingkungan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan warga. Meskipun ada perbedaan pola adaptasi berdasarkan kelas ekonomi masyarakat, namun cara mereka melakukan adaptasi adalah sama yaitu *self help* dimana adaptasi masyarakat benar-benar dilakukan secara survival oleh masyarakat setempat.

Kesimpulan

Pola adaptasi masyarakat pesisir Genuk Semarang sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi. Terdapat tiga kelas masyarakat yang berpengaruh terhadap kemampuan warga untuk beradaptasi terhadap kondisi lingkungan permukiman. Fenomena ini mendukung sebagian pernyataan Adger dan Vincent (2005), dimana kemampuan adaptasi masyarakat dipengaruhi oleh kemampuan ekonomi. Adapun faktor pengetahuan, pengalaman dan respon masyarakat terhadap lingkungan berpengaruh relatif kecil. Pengaruh faktor pengetahuan, pengalaman dan respon masyarakat lebih pada *teknologi praktis* yang digunakan masyarakat untuk bertahan. Teknologi praktis yang bersifat tradisional ini berupa pembuatan dam kecil di depan rumah hingga membuat pintu air untuk menghadang rob di saat air pasang. Kondisi ini menjelaskan bahwa proses adaptasi yang dilakukan oleh masyarakat bersifat *self help* sesuai dengan kemampuan mereka yang pada akhirnya tidak memiliki standar. Di sisi lain, pemerintah juga melakukan 'adaptasi' melalui peninggian jalan-jalan utama agar tidak tergenang, namun kenyataannya justru di rasa masyarakat merugikan mereka. Kerugian itu berupa semakin dalamnya genangan, karena jalan perkotaan yang dibangun pemerintah justru menjadi 'tanggul' yang menghalangi aliran air. Ini mengindikasikan adanya proses perencanaan kolaboratif yang tidak berjalan dengan baik di wilayah studi, namun dalam penelitian ini tidak dikupas mendalam. Menarik menjadi

tema penelitian selanjutnya adalah efektivitas perencanaan dan pembangunan dalam mewujudkan kemampuan adaptasi masyarakat.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Diponegoro yang telah mendanai penelitian pembinaan ini dalam skema Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun Anggaran 2014 melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Diponegoro Nomor DIPA-023.04.02.189185/2014 tanggal 05 Desember 2013.

Daftar Pustaka

- ABDOULLAEV, A. A Smart World: A Development Model for Intelligent Cities. The 11th IEEE International Conference on Computer and Information Technology (CIT-2011), 2011. <http://www.cs.ucy.ac.cy/CIT2011/files/SMARTWORLD.pdf>
- ADGER, W. N. & VINCENT, K. 2005. Uncertainty in adaptive capacity. *Comptes Rendus Geoscience*, 337, 399-410. <http://dx.doi.org/10.1016/j.crte.2004.11.004>
- AHLFELDT, G. M. 2011. Blessing or curse? Appreciation, amenities and resistance to urban renewal. *Regional Science and Urban Economics*, 41, 32-45. <http://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2010.07.006>
- BECKER, C. M. & MORRISON, A. R. 1999. Chapter 43 Urbanization in transforming economies. dalam: PAUL, C. & EDWIN, S. M. (eds.) *Handbook of Regional and Urban Economics*. Elsevier. [http://dx.doi.org/10.1016/S1574-0080\(99\)80012-1](http://dx.doi.org/10.1016/S1574-0080(99)80012-1)
- BLANCO, H., ALBERTI, M., OLSHANSKY, R., CHANG, S., WHEELER, S. M., RANDOLPH, J., LONDON, J. B., HOLLANDER, J. B., PALLAGST, K. M., SCHWARZ, T., POPPER, F. J., PARNELL, S., PIETERSE, E. & WATSON, V. 2009. Shaken, shrinking, hot, impoverished and informal: Emerging research agendas in planning. *Progress in Planning*, 72, 195-250. <http://dx.doi.org/10.1016/j.progress.2009.09.001>
- BROMLEY, R. D. F., TALLON, A. R. & ROBERTS, A. J. 2007. New populations in the British city centre: Evidence of social change from the census and household surveys. *Geoforum*, 38, 138-154. <http://dx.doi.org/10.1016/j.geoforum.2006.07.008>
- CADIEUX, K. V. 2008. Political ecology of exurban "lifestyle" landscapes at Christchurch's contested urban fence. *Urban Forestry & Urban Greening*, 7, 183-194. <http://dx.doi.org/10.1016/j.ufug.2008.05.003>
- CECCATO, V. & LUKYTE, N. 2011. Safety and sustainability in a city in transition: The case of Vilnius, Lithuania. *Cities*, 28, 83-94. <http://dx.doi.org/10.1016/j.cities.2010.10.001>
- CLARK, D. 1996. *Urban World/ Global City*, New York, Routledge.
- DEWI, A. 2007. *Community-based analysis of coping with urban flooding: a case study in Semarang, Indonesia*. Master of Science, ITC.
- EID, J., OVERMAN, H. G., PUGA, D. & TURNER, M. A. 2008. Fat city: Questioning the relationship between urban sprawl and obesity. *Journal of Urban Economics*, 63, 385-404. <http://dx.doi.org/10.1016/j.jue.2007.12.002>
- ERIC, M. M. N., SHOUYU, C. & LI QIN, Z. 2010. Sustainable urbanization's challenge in Democratic Republic of Congo. *Journal of Sustainable Development*, 3, 242-254. <http://dx.doi.org/10.5539/jsd.v3n2p242>
- FAHMI, F. Z., HUDALAH, D., RAHAYU, P. & WOLTJER, J. 2014. Extended urbanization in small and medium-sized cities: The case of Cirebon, Indonesia. *Habitat International*, 42, 1-10. <http://dx.doi.org/10.1016/j.habitatint.2013.10.003>
- FIRMAN, T. 2000. Rural to urban land conversion in Indonesia during boom and bust periods. *Land Use Policy*, 17, 13-20. [http://dx.doi.org/10.1016/S0264-8377\(99\)00037-X](http://dx.doi.org/10.1016/S0264-8377(99)00037-X)
- FOLKE, C. 2006. Resilience: The emergence of a perspective for social-ecological systems analyses. *Global Environmental Change*, 16, 253-267. <http://dx.doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2006.04.002>
- GRAHAM, S. 1998. The end of geography or the explosion of place? Conceptualizing space, place and information technology. *Progress in Human Geography*, 22, 165-185. <http://dx.doi.org/10.1191/030913298671334137>
- HERYANTO, J. 2004. Pergeseran nilai dan Konsumerisme di Tengah Krisis Ekonomi di Indonesia. *Nirmana*, 6, 52-62. <http://nirmana.petra.ac.id/index.php/dkv/article/view/16252>

- HOORNWEG, D., BHADA, P., FREIRE, M., TREJOS, C. & SUGAR, L. 2010. Cities and climate change: an urgent agenda. *World Bank, Washington, DC*.
- MARFAI, M. A. & HIZBARON, D. R. 2011. Community's adaptive capacity due to coastal flooding in Semarang coastal city, Indonesia. *Analele Universităţii din Oradea – Seria Geografie, 2*, 209 - 221.
- MINNERY, J., ARGO, T., WINARSO, H., HAU, D., VENERACION, C. C., FORBES, D. & CHILDS, I. 2013. Slum upgrading and urban governance: Case studies in three South East Asian cities. *Habitat International, 39*, 162-169. <http://dx.doi.org/10.1016/j.habitatint.2012.12.002>
- MURAKAMI, A., MEDRIAL ZAIN, A., TAKEUCHI, K., TSUNEKAWA, A. & YOKOTA, S. 2005. Trends in urbanization and patterns of land use in the Asian mega cities Jakarta, Bangkok, and Metro Manila. *Landscape and Urban Planning, 70*, 251-259. <http://dx.doi.org/10.1016/j.landurbplan.2003.10.021>
- MYERS, D. 1988. Building Knowledge about Quality of Life for Urban Planning. *Journal of the American Planning Association, 54*, 347-358. <http://dx.doi.org/10.1080/01944368808976495>
- NUGRAHA, A. L., PURNAMA B.S & ADITYA, T. 2012. Pemetaan risiko bencana banjir rob Kota Semarang. *The 1st Conference on Geospatial Information Science and Engineering*. Yogyakarta: Jurusan Teknik Geodesi UGM.
- ÖZKAYNAK, B. 2008. Globalisation and local resistance: Alternative city developmental scenarios on capital's global frontier—the case of Yalova, Turkey. *Progress in Planning, 70*, 45-97. <http://dx.doi.org/10.1016/j.progress.2008.04.002>
- ROGERSON, R. J. 1999. Quality of life, Place and the Global City. *dalam: YUAN, L. L. Y., BELINDA; LOW, CHRISTINE (ed.) Urban Quality of Life: Critical Issues and Options*. Singapore: School of Building and Real Estate, National University of Singapore,
- SARIFFUDDIN. Quality of Life and The Perception of Community in Semarang (Case Study: Settlement Area in Genuk, Semarang). 2nd International Conference on Environment and Urban Management (Science, Nature and Justice), 2006 Semarang. Soegijapranata Catholic University., 32-35,
- SARIFFUDDIN. Pengaruh kesejahteraan masyarakat terhadap kondisi lingkungan permukiman di sepanjang Sungai Ngilir, Semarang. *dalam: SUDIBYAKTO; HISBARON, D. R. J., RADITYA, ed. Perubahan Iklim di Indonesia Mitigasi dan Strategi Adaptasi dari Tinjauan Multidisiplin*, 13 Oktober 2010 Yogyakarta. Sekolah Pascasarjana UGM, 383-408,
- SOEMARDJAN, H. T. 1998. Pengembangan Ruang dan Papan dalam Rangka Peningkatan Ketahanan Nasional. *dalam: BUDIARDJO, E. (ed.) Sejumlah Masalah Pemukiman Kota*. Bandung: Alumni,
- SOEMARWOTO, O. 1983. *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Jakarta, Djambatan.
- SURYANTI, E. D. & MARFAI, M. A. 2008. Adaptasi Masyarakat Kawasan Pesisir Semarang Terhadap Bahaya Banjir Pasang Air Laut (Rob). *Jurnal Kebencanaan Indonesia, 1*, 335-346. <http://jurnal.pdii.lipi.go.id/index.php/search.html?act=tampil&id=57096&idc=46>
- WILONOYUDHO, S. 2009. Kesenjangan dalam Pembangunan Kewilayahan. *Forum Geografi, 23*, 167-180. <http://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/123456789/327>
- WIRASATRIA, A., HARTOKO, A. & SURIPIN 2006. Kajian kenaikan muka laut sebagai landasan penanggulangan rob di pesisir Kota Semarang. *Jurnal Pasir Laut, 1*, 31-42. <http://eprints.undip.ac.id/4155/1/lb-Anindya.pdf>
- YUAN, L. L. Y., BELINDA; LOW, CHRISTINE 1999. Quality of life in Cities - Definition, Approaches and Research. *dalam: YUAN, L. L. Y., BELINDA; LOW, CHRISTINE (ed.) Urban Quality of Life, Critical Issues and Options*. Singapore: School of Building and Real Estate National University of Singapore,
- YUSUF, A. A. & RESOSUDARMO, B. P. 2009. Does clean air matter in developing countries' megacities? A hedonic price analysis of the Jakarta housing market, Indonesia. *Ecological Economics, 68*, 1398-1407. <http://dx.doi.org/10.1016/j.ecolecon.2008.09.011>